

KAJIAN KUALITATIF TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENYALURAN DANA DESA ANTAR KABUPATEN DI JAWA BARAT BERDASARKAN KAPASITAS TATA KELOLA (ANALISIS DATA SID KEMENDESA)

¹Raudhatul Jannah, ²Rifka Aqila, ³Mia Lasmi Wardiyah

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: rdhajannah@gmail.com, rifkaaqila1@gmail.com, mialasmiwardiyah@ymail.com

Abstract

This Article investigates disparities in the disbursement rates of Village Funds across regencies in West Java Province, focusing on the role of governance capacity, and utilizes secondary data from the Village Information System (SID) of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. The study is motivated by the notable gap in disbursement performance, with certain regencies achieving over 95% realization while others remain below 80%. Such differences influence the timely execution of village development initiatives, the enhancement of the Village Development Index (IDM), and pose the risk of workload congestion at the fiscal year's end. Employing a descriptive qualitative method with content analysis, the research compares disbursement outcomes among regencies and identifies determinants of these variations. Findings reveal that governance capacity—encompassing administrative preparedness, efficiency in verification, compliance in financial reporting, and sustained guidance from the DPMD—has a greater impact than either the number of villages or the scale of allocated funds. The study concludes that strengthening governance capacity and fostering effective intergovernmental coordination are essential to achieving balanced disbursement of Village Funds. This work offers data-driven, strategic recommendations aimed at accelerating and harmonizing fund distribution, thereby promoting sustainable and impactful village development.

Keywords: Village Fund, Governance Capacity, Disbursement, West Java, SID Kemendes

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan tingkat distribusi Dana Desa di berbagai Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada kemampuan pengelolaan, dengan menggunakan data sekunder dari Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes. Latar belakang dari studi ini adalah adanya ketidakmerataan yang mencolok dalam penyaluran Dana Desa, di mana beberapa Kabupaten memperoleh realisasi lebih dari 95%, sementara yang lain berada di bawah 80%. Kondisi ini berdampak pada kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa, peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), serta memicu risiko penumpukan aktivitas di akhir tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi data penyaluran, untuk membandingkan hasil antar kabupaten dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengelolaan, yang mencakup kesiapan administrasi, kecepatan dalam proses verifikasi, disiplin dalam pelaporan keuangan, serta pembinaan intensif dari DPMD, memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan jumlah desa atau besaran alokasi dana. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan dan koordinasi antar pemerintah sebagai kunci untuk

mencapai pemerataan dalam distribusi Dana Desa. Peran dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi strategis berbasis data untuk mempercepat dan meratakan distribusi dana, demi memperkuat pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Kapasitas Tata Kelola, Penyaluran, Jawa Barat, SID Kemendesa

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah sarana dalam pengembangan desa yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia melalui mekanisme pengalihan anggaran ke daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat proses pembangunan, menekan ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat kemandirian desa sebagai partisipan dalam pembangunan. Di wilayah Provinsi Jawa Barat, alokasi Dana Desa setiap tahunnya mencapai angka yang cukup besar dan disalurkan kepada ribuan desa. Namun, berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Desa (SID) yang dikelola Kemendesa, terlihat bahwa tingkat penyaluran Dana Desa antar kabupaten di Jawa Barat masih menunjukkan perbedaan yang signifikan. Beberapa kabupaten dapat mencapai penyaluran di atas 95-100%, sementara lainnya hanya berada di kisaran 70-80%. Variasi ini tidak hanya menunjukkan perbedaan dalam hasil administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa, peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), serta potensi penumpukan aktivitas di akhir tahun anggaran.

Hasil dari analisis pada kajian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam penyaluran ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah desa atau besaran dana yang dialokasikan. Contohnya terlihat pada Kabupaten Bekasi, di mana meskipun memiliki jumlah desa yang tidak banyak, tingkat penyalurannya tetap berada pada posisi rendah. Ini memperkuat argumen bahwa faktor yang lebih berpengaruh adalah kemampuan dalam pengelolaan, yang mencakup kesiapan administrasi di tingkat desa, kecepatan dalam verifikasi oleh pemerintah Kabupaten, disiplin dalam pelaporan keuangan, serta dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kabupaten yang memiliki pengelolaan yang baik dan koordinasi antar lembaga yang efisien dapat mempercepat proses penyaluran, sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan keuntungan dari program tersebut segera dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, Kabupaten dengan pengelolaan yang kurang baik sering mengalami keterlambatan, yang menyebabkan penundaan dalam pembangunan dan menurunnya kualitas hasil pekerjaan karena terbatasnya waktu untuk pelaksanaan.

Berdasarkan perihal yang ada, diperlukan studi lanjut untuk mengeksplorasi keterkaitan antara kemampuan pengelolaan dengan variasi dalam penyaluran Dana Desa di berbagai kabupaten di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data dari SID Kemendesa sebagai sumber utama guna memetakan hasil penyaluran, menemukan pola ketimpangan, dan menyusun rekomendasi strategis seperti peningkatan kapasitas pegawai desa, digitalisasi sistem administrasi, pemantauan berbasis data, serta peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis perbedaan tingkat penyaluran Dana Desa antar kabupaten di Jawa Barat berdasarkan perspektif kebijakan dan kapasitas tata kelola. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari dashboard Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa yang memuat informasi penyaluran Dana Desa tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui desk study dengan mengakses, mengunduh, dan mengolah data dari sumber resmi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan membandingkan capaian penyaluran antar kabupaten, mengidentifikasi faktor kebijakan, serta mengevaluasi kapasitas tata kelola yang memengaruhi perbedaan tersebut. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel pendukung untuk memperjelas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Dana Desa
Padat Karya Tunai Desa
BLT Desa

Berikut dibawah ini adalah Tabel penyaluran Dana Desa per Provinsi :

No	Wilayah / Lokasi	Jumlah Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD	Persentase Total Penyaluran	Alokasi Covid-19	BLT Desa
1	BOGOR	416	Rp. 589.286.423.000	Rp. 596.200.171.850	99,29 %	Rp. 0	Rp. 107.978.400.000
2	SUKABUMI	381	Rp. 436.532.604.000	Rp. 351.233.282.490	78,62 %	Rp. 0	Rp. 46.395.900.090
3	CIANJUR	354	Rp. 442.301.848.000	Rp. 332.227.456.550	73,53 %	Rp. 0	Rp. 44.058.600.000
4	BANDUNG	270	Rp. 366.813.940.000	Rp. 369.086.773.250	98,66 %	Rp. 0	Rp. 52.704.900.000
5	GARUT	421	Rp. 480.458.664.000	Rp. 460.022.490.350	93,57 %	Rp. 0	Rp. 64.918.800.000
6	TASIKMALAYA	351	Rp. 391.495.129.000	Rp. 386.399.968.650	96,39 %	Rp. 0	Rp. 56.444.400.000
7	CIAMIS	258	Rp. 259.544.809.000	Rp. 261.054.919.550	97,95 %	Rp. 0	Rp. 32.003.100.000
8	KUNINGAN	361	Rp. 342.964.640.000	Rp. 343.802.492.000	97,50 %	Rp. 0	Rp. 40.964.400.000
9	CIREBON	412	Rp. 454.999.253.000	Rp. 462.501.959.400	99,24 %	Rp. 0	Rp. 60.640.200.000
10	MAJALENGKA	330	Rp. 319.732.709.000	Rp. 289.573.941.800	88,14 %	Rp. 0	Rp. 32.496.800.000
11	SUMEDANG	270	Rp. 270.187.429.000	Rp. 277.438.841.700	100,00 %	Rp. 0	Rp. 34.833.600.000
12	INDRAMAYU	309	Rp. 341.601.699.000	Rp. 321.496.825.379	91,90 %	Rp. 0	Rp. 44.201.700.000
13	SUBANG	245	Rp. 273.767.528.000	Rp. 280.609.968.800	100,00 %	Rp. 0	Rp. 42.145.200.000
14	PURWAKARTA	183	Rp. 185.441.490.000	Rp. 189.235.104.200	99,28 %	Rp. 0	Rp. 34.200.900.000
15	KARAWANG	297	Rp. 344.345.343.000	Rp. 347.721.734.300	98,70 %	Rp. 0	Rp. 51.267.600.000
16	BEKASI	180	Rp. 253.694.685.000	Rp. 230.653.094.400	89,15 %	Rp. 0	Rp. 47.423.700.000
17	BANDUNG BARAT	165	Rp. 238.089.429.000	Rp. 242.697.615.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 32.659.200.000
18	PANGANDARAN	93	Rp. 95.018.623.000	Rp. 62.588.659.403	63,99 %	Rp. 0	Rp. 8.067.800.003
19	KOTA BANJAR	16	Rp. 17.356.833.000	Rp. 16.342.976.000	91,22 %	Rp. 0	Rp. 2.718.900.000
Ringkasan		Total	Total	Total	Rata - Rata	Total	Total
		5.312	Rp. 6.103.633.078.000	Rp. 5.820.888.275.072	35,14 %	Rp. 0	Rp. 836.124.100.093

Tingkat Penyaluran Dana Desa Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Menurut Data SID Kemendesa

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa, distribusi Dana Desa di wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara masing-masing Kabupaten. Variasi ini terlihat baik dari jumlah dana yang telah disalurkan maupun persentase realisasi terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, Kabupaten yang memiliki tingkat distribusi tinggi cenderung menunjukkan sejumlah karakteristik yang stabil, seperti kelengkapan dokumen administrasi yang siap pada waktunya, kemampuan pemerintah desa yang responsif terhadap prosedur penyaluran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan yang melakukan penyaluran. Di sisi lain, kabupaten dengan tingkat penyaluran yang rendah sering kali menghadapi masalah administratif, keterlambatan dalam laporan, serta kurangnya kesiapan untuk memenuhi syarat teknis penyaluran.

Pada umumnya, terdapat **tiga** kategori utama kabupaten yang didasarkan pada tingkat penyaluran yang telah dicapai:

- **Kabupaten dengan tingkat distribusi tinggi ($\geq 95\%$)**

Contoh: **Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Kuningan.**

Kabupaten-kabupaten ini berhasil menyalurkan dana Desa dengan cepat dan hampir merata ke semua desa sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang mendukungnya antara lain:

- 1) Pengorganisasian yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat kabupaten dengan Pemerintah Desa.
- 2) Kesiapan administrasi di tingkat desa yang baik dan matang, termasuk laporan pertanggungjawaban dari tahap sebelumnya yang dapat diverifikasi dengan cepat.
- 3) Tingkat pemahaman aparatur desa dalam penggunaan aplikasi digital pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) yang tinggi.

- **Kabupaten dengan tingkat distribusi sedang (80–94%)**

Contoh: **Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Majalengka.**

Dalam kategori ini, proses distribusi berjalan cukup baik meskipun ada beberapa desa yang terhambat dalam menerima dana pada tahap akhir. Beberapa penyebabnya meliputi:

- 1) Keterlambatan dalam pengiriman dokumen verifikasi oleh beberapa desa.
- 2) Masalah teknis yang terjadi selama proses input dan verifikasi data di tingkat Kabupaten.
- 3) Tantangan dalam pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian pada jadwal distribusi.

- **Kabupaten dengan tingkat distribusi rendah ($< 80\%$)** Contoh: **Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, dan**

Kabupaten Sukabumi. Dalam kategori ini, terdapat beberapa kendala yang cukup jelas, antara lain:

- 1) Jumlah desa yang sangat besar, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu yang lebih lama.
- 2) Terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas pengelolaan keuangan di antara desa- desa, sehingga verifikasi harus dilakukan secara bertahap dan tidak serentak.
- 3) Ada desa yang belum menyelesaikan laporan penggunaan dana dari tahap sebelumnya, sehingga penyaluran untuk tahap selanjutnya terhambat.

Berdasarkan evaluasi data dari SID Kemendesa, variasi dalam distribusi Dana Desa diantara Kabupaten di Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen administratif serta kecepatan dalam tahap verifikasi di Kabupaten.

Sebagai contoh, ada kabupaten yang memiliki jumlah desa relatif sedikit, namun tingkat distribusi dananya tetap rendah, seperti Kabupaten Bekasi, yang menunjukkan bahwa jumlah desa tidak selalu berhubungan langsung dengan laju distribusi. Ini menegaskan bahwa mutu manajemen, sistem pemantauan, dan disiplin dalam pelaporan desa jauh lebih berpengaruh dibandingkan faktor-faktor yang bersifat kuantitatif saja.

Di samping itu, tingkat ketepatan desa dalam melaporkan informasi keuangan menjadi faktor krusial. Kabupaten yang mendapatkan bimbingan yang intensif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) umumnya dapat mengurangi keterlambatan penyaluran di bawah 5% dari total desa.

Variasi dalam tingkat distribusi ini memberikan dampak langsung pada sejumlah aspek yang penting. **Pertama**, Kabupaten dengan distribusi yang cepat dapat segera melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga warga desa merasakan manfaatnya lebih awal. **Kedua**, data historis menunjukkan bahwa kabupaten yang mendistribusikan dana secara tepat waktu cenderung mengalami peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih signifikan dibandingkan dengan Kabupaten yang mengalami penyaluran yang lambat. **Ketiga**, Kabupaten yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran sering kali menghadapi risiko penumpukan realisasi pada akhir tahun, yang dapat menyebabkan tingginya beban kerja dan berpotensi mengurangi kualitas pembangunan karena terbatasnya waktu untuk pelaksanaan.

Analisis Perbedaan Tingkat Penyaluran Dana Desa Antar Kabupaten di Jawa Barat

Berdasarkan data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat penyaluran Dana Desa di berbagai kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dapat diamati dari tiga indikator utama, yaitu: (1) persentase realisasi penyaluran dibandingkan pagu, (2) kecepatan penyaluran antar tahap, dan (3) kesesuaian penyaluran dengan prioritas penggunaan.

1. Persentase Realisasi Penyaluran

Kabupaten dengan kapasitas tata kelola yang baik, seperti tingkat koordinasi yang tinggi antara pemerintah daerah dan desa, umumnya mampu mencapai realisasi penyaluran di atas 95% dari pagu. Sebaliknya, kabupaten dengan hambatan administratif, keterbatasan sumber daya manusia, atau proses verifikasi berlapis cenderung mengalami realisasi di bawah 90%.

2. Kecepatan Penyaluran Antar Tahap

Beberapa kabupaten dapat menyalurkan tahap pertama dan kedua lebih awal sesuai jadwal, sehingga program desa dapat berjalan tepat waktu. Namun, kabupaten yang menghadapi kendala seperti keterlambatan pelaporan, perbedaan data antara desa dan pusat, atau revisi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sering mengalami keterlambatan hingga tahap akhir penyaluran.

3. Kesesuaian dengan Prioritas Penggunaan

Data menunjukkan bahwa kabupaten dengan sistem perencanaan partisipatif yang kuat lebih konsisten menyalurkan dana sesuai prioritas nasional (misalnya penguatan ketahanan pangan, penanganan kemiskinan, dan penurunan stunting). Sebaliknya, beberapa kabupaten mengalami pergeseran alokasi akibat kebutuhan mendesak di lapangan atau kurangnya sosialisasi kebijakan prioritas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat penyaluran Dana Desa:

1. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
2. Kualitas sistem monitoring dan evaluasi
3. Kedisiplinan administrasi desa
4. Efektivitas koordinasi antar pihak terkait
5. Kondisi geografis
6. Aksesibilitas
7. Dinamika sosial-ekonomi daerah

Secara keseluruhan, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa kabupaten dengan kapasitas tata kelola yang tinggi cenderung memiliki tingkat penyaluran Dana Desa yang lebih cepat, tepat, dan sesuai target, sedangkan kabupaten dengan kapasitas rendah menghadapi risiko keterlambatan dan penyimpangan penggunaan dana.

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kapasitas tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor kunci dalam efektivitas penyaluran Dana Desa antar kabupaten di Jawa Barat. Kapasitas ini mencakup kemampuan pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai regulasi. Data SID Kemendesa menunjukkan adanya hubungan positif antara kapasitas tata kelola dengan ketepatan waktu, besaran realisasi, dan kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas nasional.

Secara konseptual, kapasitas tata kelola mencakup dimensi kelembagaan, sumber daya manusia, prosedur administrasi, dan koordinasi lintas pihak. Desa dengan struktur organisasi jelas, pembagian tugas tegas, dan mekanisme kerja terdokumentasi, umumnya lebih optimal dalam penyaluran. Kompetensi aparatur desa, termasuk kemampuan mengoperasikan sistem informasi keuangan, juga menjadi penentu kelengkapan dokumen dan akurasi pelaporan.

Prosedur administrasi yang sederhana dan konsisten mempercepat verifikasi dan penyaluran. Koordinasi efektif antara pemerintah desa, kabupaten, dan kementerian dapat mengurangi hambatan birokrasi. Desa dengan komunikasi intensif ke tingkat kabupaten mampu meminimalkan risiko keterlambatan penyaluran dana.

Faktor eksternal seperti aksesibilitas, infrastruktur teknologi, dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi kapasitas. Akses internet memadai mempercepat pengunggahan dokumen daring, sedangkan keterbatasan infrastruktur di desa terpencil sering menghambat penyaluran. Dengan demikian, kapasitas tata kelola bukan sekadar aspek administratif, tetapi prasyarat strategis bagi penyaluran dana yang tepat waktu, jumlah, dan sasaran. Peningkatannya memerlukan pelatihan aparatur, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa, perbedaan penyaluran Dana Desa antar kabupaten di Jawa Barat lebih dominan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas administratif dibanding faktor kuantitatif seperti jumlah desa atau besaran anggaran. Kabupaten dengan kelembagaan kuat, administrasi tertib, koordinasi efektif, dan infrastruktur teknologi memadai cenderung menyalurkan dana lebih cepat, tinggi, dan sesuai prioritas nasional. Sebaliknya, kelemahan pada aspek tersebut kerap menimbulkan keterlambatan, penumpukan realisasi, dan penurunan kualitas pembangunan. Faktor eksternal seperti geografis, aksesibilitas, dan dinamika sosial-ekonomi juga memengaruhi efektivitas penyaluran. Penguatan tata kelola menjadi kunci strategis untuk memastikan distribusi Dana Desa tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan pemerataan dan efektivitas penyaluran, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi Sistem Informasi

Desa (SID), peningkatan transparansi, dan evaluasi berkala berbasis data. Dengan langkah ini, diharapkan distribusi dana menjadi lebih tepat sasaran dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). *Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung)*. Jurnal Sosial Dan Humaniora, 1(2), 61-69.
2. Nosa, Ica Perbina Seri & Rossevelt, Franklin Asido. (2025). *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. 5 (1)
3. Suhartini, Ade., dkk. (2021). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas Dan Pengawasan Masyarakat*. Jurnal Equity. 24(2).
4. Ali, Khaidir., & Saputra, Agung. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 14(4).
5. Ambarwati, K., Nikmatullah, D., & Listiana, I. (2021). *Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(2), 326-338. doi:<https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1320>
6. Sakina, I., & Suherman, A. (2022). *Prosedur Penyaluran Dana Desa Di Provinsi Jawa Barat(Studi Pada BPKAD Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Manajemendan Bisnis, 1(1), 10-16. doi:<https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1320>
7. Pangke, R. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J. B. (2020). *Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Berkala Imiah Efisiensi, 19(3), 1-11.
8. Abidin, M. Z. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. 6(1), 61-76. doi:<https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>